

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1. Geografi dan Topografi

Desa Rambah Muda merupakan salah satu desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Desa Sianak adalah batas desa ini sebelah Utara, Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Hilir, sedangkan sebelah Barat dan Timur berbatasan dengan Desa Rambah.. Jarak Desa dengan Ibukota Kecamatan 7,5 km dengan waktu tempuh 30 menit kendaraan bermotor, dan dari Ibukota kabupaten 33 km dengan waktu tempuh 45 menit.

Secara topografi Desa Rambah Muda pada umumnya merupakan dataran sedang dengan sedikit perbukitan, 86 m Dari Permukaan Laut, jumlah bulan hujan 6, dan suhu udara rata-rata 34<sup>0</sup> C (Monografi Desa Rambah Muda, 2005).

Desa Rambah Muda merupakan salah satu Desa Transmigrasi Umum di wilayah SKPD. Secara geografis desa ini lebih strategis dibanding 5 Desa di daerah SKPD lainnya, karena merupakan pintu gerbang masuk maupun keluar menuju ibukota kecamatan dan kabupaten. Luas lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat adalah 5155 ha dari luas Desa Rambah Muda secara keseluruhan 16.600 ha. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk lahan perkebunan rakyat seluas 3600 ha (21,45%). Perkebunan rakyat dimaksud yaitu lahan untuk budidaya Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi dan Pinang. Desa Rambah Muda juga memiliki sawah tanah hujan dengan luas 400 ha (2,38%). Penggunaan lahan lainnya mencakup tanah kas desa dan sarana umum dengan masing masing luas 35 ha (0,21%) dan 10 ha (0,06%). Pemukiman masyarakat memanfaatkan lahan seluas 560 ha ditambah 460 ha (2,74%) pekarangan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Luas Penggunaan Lahan di Desa Rambah Muda Tahun 2005

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Perkebunan Rakyat	3600	21,45
Sawah Tanah Hujan	400	2,38
Tanah Kas Desa	3	0,21
Pekarangan	460	2,74
Hutan/Lahan Kosong	11.265	67,13
Perumahan	560	3,34
Sarana Umum	10	0,06
Lainnya	90	0,54
Jumlah	16.780	100,00

Sumber : Monografi Desa Rambah Muda, 2005

#### 4.1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Rambah Muda Termasuk kedalam golongan rendah dan belum merata. Hampir setengah dari masyarakat desa tidak tamat Sekolah Dasar (49,62%), baik itu masyarakat yang berada pada kategori usia sekolah maupun masyarakat yang belum berada pada usia sekolah. Masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tingkat Akademi atau Perguruan Tinggi masih sedikit atau masing masing 0,43% dan 0,31%.

Tabel 5. Jumlah Masyarakat Desa Rambah Muda Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Tidak / belum Tamat SD	812	49,62
Tamat SD	401	25,21
Tamat SLTP	310	17,91
Tamat SLTA	112	6,54
Tamat Akademi	8	0,43
Perguruan Tinggi	5	0,31
Jumlah	1648	100,00

Sumber: Monografi Desa Rambah Muda, 2005

#### 4.1.3. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Rambah Muda memiliki mata pencaharian yang masih berpusat kepada Sektor Pertanian. Mata pencaharian masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama yang secara umum diusahakan. Kelompok mata pencaharian tersebut adalah Petani atau Pemilik Lahan, Buruh Tani



dan Transportasi, Pedagang, Montir, Supir, Industri Kecil, Pegawai Negeri Sipil serta Bidan dan Dokter.

Mata pencaharian masyarakat Desa Rambah Muda yang terbesar adalah Buruh Tani dan Transportasi sebanyak 410 KK (35,12%), ini justru bertolak belakang dengan awal terbentuknya desa sebagai daerah transmigrasi tanaman pangan. Hal ini disebabkan banyak para transmigran menjual tanah dan ditambah lagi oleh banyaknya pendatang yang masuk kemudian. Masyarakat yang memiliki lahan dan memanfaatkannya untuk pertanian sebanyak 275 KK (35,12%). Untuk proses tukar menukar barang di Desa Rambah Muda terdapat 30 KK (38,30%) yang bekerja sebagai pedagang baik untuk komoditi pertanian maupun barang harian. Mata pencaharian terkecil masyarakat adalah sebagai pengrajin yaitu sebanyak 2 KK (0,26%). Sebanyak 25 KK (3,19%) dari total masyarakat bekerja sebagai PNS/TNI. Profesi dibidang jasa yang meliputi ojek motor dan las ditekuni oleh 22 KK (2,81%). Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai supir sebanyak 8 KK(1,02%).Persentase di bawah 1% terdapat pada mata pencaharian sebagai pengrajin, industri kecil, dokter/bidan/mantri masing-masing 0,26%, 0,77%, 0,64% atau 2, 6, 5 KK. Rincian mata pencaharian masyarakat Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Muda Kabupaten Rokan hulu pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Masyarakat Desa Rambah Muda Menurut Mata Pencaharian Tahun 2005

Mata Pencaharian	Jumlah (KK)	Persentase (%)
Petani	275	35,12
Pedagang	30	38,3
Buruh tani dan Transportasi	410	52,36
Jasa ( las,ojek dll)	22	2,81
Supir	8	1,02
PNS/TNI	25	3,19
Pengrajin	2	0,26
Industri kecil	6	0,77
Dokter/bidan/mantri	5	0,64
Total	783	100,00

Sumber: Kantor Desa Rambah Muda 2005

#### 4.1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan hubungan yang baik antara masyarakat dengan dunia luar seperti informasi pasar dan informasi yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah yang dapat mereka gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan roda ekonomi maupun sosial.

Fasilitas umum yang tersedia di desa Rambah Muda adalah jalan, perumahan, mesjid, musholla, sarana perbelanjaan yaitu warung untuk proses perbelanjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sarana pendidikan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Tabel. 7 Distribusi Sarana dan Prasarana Desa Rambah Muda

Jenis Sarana	Jumlah (unit)
Mesjid	3
Musholla	30
TK	2
SD	4
SLTP	1
Jembatan	5
Pasar Desa	1
Kelompok Simpan Pinjam	3
Puskesmas	1
Gilingan padi	5

Sumber : Monografi Desa Rambah Muda 2006

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi, wilayah desa sudah dapat dijangkau sinyal GSM yang dirasakan sangat banyak membantu masyarakat baik untuk usaha peningkatan ekonomi, menjalankan roda pemerintahan, maupun untuk kebutuhan lainnya.

#### 4.2. Identitas Responden

Ada beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk menggambarkan kehidupan sampel agar dapat menunjang kejelasan lebih lanjut. Kriteria tersebut antara lain umur, tingkat pendidikan, jenis dan lama usaha, dan jumlah tanggungan keluarga.

#### 4.2.1. Umur

Umur sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkat usaha. Kapasitas fisik atau tenaga berbanding terbalik dengan umur, semakin tinggi umur semakin rendah kemampuan fisiknya. Usia produktif cenderung lebih mudah mengadopsi hal-hal baru dan punya keinginan lebih untuk merespon hal-hal yang bersifat positif yang bertujuan untuk pengembangan usaha ekonomi. Nilai tambah dari hal tersebut dapat berdampak kepada kemampuan dalam peningkatan pendapatan. Angkatan kerja berusia produktif berkisar antara 15-55 tahun (Latief dalam Yasin, 1996)

Tabel 8. Distribusi Umur Responden pemanfaat Dan Non Pemanfaat Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Umur	Pemanfaat		Non Pemanfaat	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
15-29	4	20	-	-
30-44	6	30	1	33
45-55	8	40	2	66
>55	2	10	-	-
jumlah	20	100	3	100

Umur responden pemanfaat kebanyakan pada usia produktif yaitu sebanyak 18 responden (90%), sedangkan untuk non pemanfaat tepat pada bilangan 100%. Hal ini merupakan modal bagus untuk kelancaran pembangunan ekonomi.

#### 4.2.2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan pengalaman akan mempengaruhi cakrawala gagasan yang ada pada pikiran masyarakat. Menurut Mubyarto (1995) bahwa produktifitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan cara pendidikan dan latihan, untuk meningkatkan mutu dan hasil kerjanya. Tingkat pendidikan formal adalah kriteria yang diambil dalam penelitian ini.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Responden Penerima Dan Non Penerima PPD.

Tingkat Pendidikan	Pemanfaat		Non Pemanfaat	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Tidak tamat SD	2	10	1	33
Tamatan SD	14	70	1	33
SLTP	4	20	1	33
SLTA/ sederajat	-	-	-	-
Tamat Akademi	-	-	-	-
Tamat Perguruan Tinggi	-	-	-	-
Jumlah	20	100	3	100

Tabel 9 menjelaskan tingkat pendidikan responden, tingkat pendidikan responden pemanfaat yang tertinggi adalah tamatan SD berjumlah 14 responden (75,00%), tamatan SLTP berjumlah 4 responden (20%). Untuk non pemanfaat tidak tamat SD, tamatan SD, dan tamatan SLTP berjumlah sama 1 responden atau masing-masing 33%. Hal yang cukup memprihatinkan adalah tidak adanya responden pemanfaat maupun non pemanfaat yang memiliki ijazah perguruan tinggi, akademi, maupun SLTA. Secara umum ini menandakan bahwa pendidikan formal responden relatif rendah sehingga menyebabkan kelemahan dalam hal adopsi teknologi dan kepekaan sosial ekonomi yang sangat berdampak pada kemampuan penciptaan lapangan pekerjaan, efisiensi kerja, dan perencanaan keuangan. Kurangnya kontrol sosial juga akibat dari rendahnya pendidikan formal. Dari segi proses pemberdayaan hal ini bukanlah menjadi hambatan, namun justru masyarakat seperti inilah yang menjadi sasaran pemberdayaan.

#### 4.2.3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga responden pemanfaat dan non pemanfaat program mempengaruhi besarnya pengeluaran dan berdampak kepada jumlah pendapatan yang harus ditabung. Jumlah tanggungan meliputi istri, anak dan ditambah dengan anggota keluarga lain.

Tabel 10. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Penerima Dan Non Penerima PPD.

Jumlah Tanggungan Keluarga (Jiwa)	Pemanfaat		Non Pemanfaat	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
2-4	6	30	2	66
5-7	12	60	1	33
>7	2	10	-	-
Jumlah	20	100	3	100

Jumlah tanggungan keluarga 2-4 orang tergolong kepada tingkat yang rendah. Untuk pemanfaat, golongan ini berjumlah 6 responden (30%), sedangkan untuk non pemanfaat berjumlah 2 responden (66,66%). Jumlah tanggungan yang terbesar untuk pemanfaat adalah berkisar pada range 5-7 orang tanggungan yaitu 12 responden (60%). Untuk kisaran ini pada non pemanfaat berjumlah 1 responden (33%). Untuk jumlah tanggungan yang tergolong tinggi atau >7 tanggungan pada pemanfaat berjumlah 7 responden, sedangkan untuk non pemanfaat tidak ada. Hal ini mengindikasikan tingginya jumlah tanggungan responden yang berdampak pada tingginya pengeluaran.

#### 4.2.4. Pengalaman Berusaha

Pengalaman berusaha juga merupakan faktor penentu dalam rangka peningkatan pendapatan. Hal ini berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan dalam pengembangan pendapatan, terutama dalam kemampuan responden untuk mengadopsi teknologi baru maupun dalam kemampuan mengatasi permasalahan yang mungkin akan dihadapi, bahkan dalam program pemberdayaan masyarakat pengalaman berusaha dijadikan salah satu syarat mutlak calon pemanfaat untuk mendapatkan pinjaman pengalaman usaha responden berkisar antara 1-25 tahun.

Tabel 11. Pengalaman Berusaha Responden

Pengalaman Berusaha (tahun)	Pemanfaat		Non Pemanfaat	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1-5	4	20	2	66
5-10	11	55	1	33
10-15	1	5	-	-
15-20	1	5		
20-25	3	15		
Jumlah	20	100	3	100

Pengalaman berusaha tani pemanfaat terbanyak adalah 5-10 tahun dengan 11 responden (55%), diikuti dengan pengalaman 1-5 tahun sebanyak 4 responden (20%). Pengalaman 20-25 tahun ditemukan pada 3 responden (15%). Untuk Pengalaman 10-15 tahun dan 15-20 tahun masing-masing 1 responden (5%).

Untuk non pemanfaat pengalaman berkisar 1-10 tahun dimana 2 responden (66,66%) untuk pengalaman 1-5 tahun dan 1 responden (33,33%) dengan pengalaman 1-5 tahun.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa pemanfaat dan non pemanfaat telah memiliki cukup pengetahuan dalam pengembangan usahanya. Selain itu daerah ini memiliki tingkat kekeluargaan yang tinggi sehingga mudah terjadinya tukar pengalaman antar masyarakat.

### 4.3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa

#### 4.3.1. Profil Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Salah satu tujuan dari penyaluran Dana Usaha Desa adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau lembaga keuangan dalam rangka pengembangan usaha. Bagian dari program pemberdayaan desa untuk Desa Rambah Muda telah dibentuk lembaga keuangan Usaha Unit Desa Simpan Pinjam, sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Perlindungan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau. Untuk kepengurusan telah dipilih melalui Musyawarah Desa 1 dengan memperhatikan keterlibatan dari kaum perempuan.

Melaui SK Bupati Rokan hulu, maka tanggal 1 Juni 2005 ditetapkan kepengurusan UED-SP Rambah Muda sebagai berikut:

Tabel 12. Susunan Kepengurusan UED-SP Rambah Muda

Nama	Jenis Kelamin	Tempat tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan
Hariyati	Perempuan	Binje, 10-5-1962	D. I	Ketua
Widia K	Perempuan	P.baru, 14-6-1983	D. I	Kasir
Gatot S	Laki-laki	Nganjuk, 6-7-1980	SMP	TU
Ashad	Laki-laki	Bojo, 1-12-1963	SMP	Otoritas
Tuminah	Perempuan	Medan, 27-02-70	SMA	Otoritas
Sarjana	Laki-laki	Klaten, 9-01-1947	SMA	Otoritas
Sugeng	Laki-laki	Kediri, 7-5-1967	SMP	BPD
Mujiyem	Perempuan	Malang, 25 - 02 - 1970	SMA	KPM
Warsito	Laki-laki	Klaten, 16 - 10 - 1967	SD	KPM
Riono	Laki-laki	Kediri, 10-12-1963	SD	KPM
Jagal	Laki-laki	Nganjuk, 1950	SD	Verifikasi
Sadi	Laki-laki	Bojo, 1-12-1964	SD	Verifikasi
Paidi	Laki-laki	Nganjuk, 1950	SMP	Verifikasi
Lasiman	Laki-laki	Bojo, 31-12-1961	SMA	Verifikasi
Supartono	Laki-laki	Rembang 10-10-1969	SMA	Verifikasi

#### 4.3.2. Penyaluran Dana Usaha Desa

Proses penyaluran pinjaman diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon pemanfaat dengan menyerahkan surat permohonan kredit kepada UED-SP dengan lampiran (i) Fotocopy KTP, (ii) Kartu Keluarga, (iii) Rencana Usaha (RUA), (iv) Pernyataan Kesiediaan Agunan, (v) fotocopy bukti rekening tabungan bank, (vi) fotocopy surat kuasa bank untuk memindahkan bukukan tabungan beku kelompok ke rekening UPK di bank sebagai angsuran apabila terjadi tunggakan dan (vii) rencana pengembalian kredit. Selanjutnya Tim verifikasi akan menetapkan calon pemanfaat yang layak diberikan pinjaman dalam bentuk perangkan. Melalui Musyawarah Desa II yang melibatkan seluruh masyarakat maka ditetapkan calon pemanfaat yang berhak menerima pinjaman.

Penetapan bunga pinjaman dan masa pengembalian juga ditetapkan melalui Musyawarah Desa 2. Untuk UED-SP Rambah Muda ditetapkan bunga pinjaman 24% dengan masa pengembalian 18 bulan. Dari informasi responden non pemanfaat



diketahui bahwa bunga senilai tersebut bukan termasuk alasan mereka untuk tidak memanfaatkan pinjaman.

Permohonan pinjaman masyarakat diseleksi dengan ketat, diharapkan dapat memanfaatkan potensi desa dengan baik. Sehingga sebagian besar permohonan banyak untuk bidang usaha perkebunan kerana dilihat dari berbagai sisi desa Rambah Muda memang sangat potensial untuk ini.

Proses pengajuan proposal dipandu oleh pendamping desa dan dibantu oleh pengurus lain dengan sistem berantai dimana masyarakat yang sudah mengerti dapat menjelaskan kepada masyarakat lain sehingga dalam proses ini diharapkan pemberdayaan jelas terlihat.

Dalam pelaksanaannya cukup sulit yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat namun dengan kesabaran pendamping hal ini dapat segera diatasi dengan baik.

Besarnya pinjaman yang diajukan responden miskin berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000.

Tabel 13. Pengajuan Pinjaman Pemanfaat

Batas Klas Pengajuan Pinjaman (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1.000.000 - 2.999.000	13	65	23.000.000	32,86
3.000.000 - 4.999.000	3	15	10.000.000	14,29
5.000.000 - 6.999.000	1	5	5.000.000	7,14
7.000.000-8.999.000	1	5	7.000.000	10,00
>9.000.000	2	10	25.000.000	35,71
Jumlah	20	100	70.000.000	100

Responden terlihat masih ragu-ragu untuk memanfaatkan pinjaman, ini dapat terlihat dari nilai pengajuan proposal dengan nilai dibawah Rp 3.000.000 yakni sebanyak 13 responden (65%) dengan total Rp 23.000.000 (32,86%). Hal ini cukup dimaklumi karena hampir semua responden belum pernah memanfaatkan pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya. Batas kelas pengajuan Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 4.999.000 ditemukan pada 3 responden (15%) dengan total pinjaman

Rp 10.000.000 (14,29%). Dari 20 responden hanya 2 responden (10%) yang mengajukan pinjaman diatas Rp 9.000.000 dengan total pinjaman Rp 25.000.000 (35,71%). Nilai Pinjaman Rp 5.000.000 - Rp 6.999.000 dan Rp 7.000.000 - Rp 8.999.000 sama-sama ditemukan pada 1 responden dengan total masing-masing Rp 5.000.000 (7,14%) dan Rp 7.000.000 (10,00%).

Tabel 14. Jumlah Pinjaman Modal Usaha Desa yang Disalurkan oleh Peminjam yang Terkategori Miskin

Batas Klas Pengajuan Pinjaman (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1.000.000 - 2.999.000	14	70	23.000.000	40,35
3.000.000 - 4.999.000	3	15	9.000.000	15,79
5.000.000 - 6.999.000	2	10	10.000.000	17,54
7.000.000 - 8.999.000	0	0	0	0
>9.000.000	1	10	15.000.000	26,32
Jumlah	20	100	57.000.000	100

Terdapat sedikit perbedaan antara yang diusulkan dengan yang disetujui, dimana jumlah responden yang disetujui dengan pinjaman pada posisi Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 semakin banyak yakni sebanyak 14 responden dengan total nilai pinjaman Rp 23.000.000 (40,35%). Perbedaan Mencolok juga pada nilai pinjaman > Rp 9.000.000 yakni dengan total pinjaman Rp 15.000.000 (26,32%) yang hanya ditemukan pada 1 responden.

Tabel 15. Total dan Rata-Rata Pinjaman

	Pengajuan (Rp)	Disetujui (Rp)	Persentase (%)
Total pinjaman	70.000.000	57.000.000	81.43%
Rata-rata	3.500.000	2.850.000	

Dilihat dari rata-rata pengajuan dan yang disetujui terlihat perbedaan namun tidak mencolok, dimana nilai rata-rata pengajuan Rp 3.500.000 sedangkan yang disetujui Rp 2.850.000 atau terealisasi 81.43 %. Hali ini diakibatkan oleh minimnya dana pinjaman yang ada pada pengelola sehingga perlu dicari skala prioritas melalui perangkungan maupun pengurangan nilai pinjaman.

Tabel 16. Hasil Uji T Sampel Berpasangan Pengajuan Dan Realisasi

Uraian	Nilai
Rataan selisih antara besar yang pengajuan dengan yang disetujui ( $D^-$ )	650.000
Simpangan baku (Sd)	3.295.410
Jumlah sampel (n)	20
t-hitung	0,676
t-tabel	1,725

Apabila jumlah pinjaman yang diajukan dan jumlah pinjaman yang disetujui dianalisis menggunakan uji beda dua mean sampel berpasangan menunjukkan secara statistik tidak berbeda nyata berbeda nyata ( $t\text{-tabel} > t\text{-hitung}$ ) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 16. Hal ini berarti bahwa pinjaman modal usaha dari dana usaha desa yang disalurkan (disetujui) dengan usulan tidak berbeda jauh. Ini juga didukung bahwa 18 responden (90%) menerima keputusan itu. Karena mereka tahu keputusan tersebut merupakan keputusan bersama dan dengan segala keterbatasan dana.

Tabel 17. Penggunaan Dan Pinjaman Oleh Reponden

Penggunaan Dana Pinjaman	Frekuensi (Orang)	Nilai (Rp)	Presentase (%)
Sesuai Proposal	19	39.000.000	68,42
Usaha lain	2	3.000.000	5,26
Pendidikan/pangan/kesehatan	9	12.000.000	21,05
Konsumsi lainnya	1	3.000.000	5,26

Pinjaman sebesar Rp 3.000.000 yang digunakan untuk keperluan lain adalah sebesar Rp 3.000.000. Penggunaan pinjaman untuk pendidikan, pangan dan kesehatan sebesar Rp 12.000.000. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk menunjang usaha bengkelnya. Hal ini juga dapat dimaklumi. 2 responden terpaksa mengalihkan uang pinjaman kepada usaha lain mengingat saat pinjaman dicairkan responden melihat usaha sampingan lebih cerah prospeknya untuk

saat itu. Ini diakibatkan pengaruh musim kemarau. Penggunaan dana pinjaman sesuai dengan proposal hanya 68,42% dari total pinjaman atau senilai Rp 39.000.000.

#### 4.3.3. Pengembalian Dana Pinjaman

Menurut petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa, Total pengembalian yang efektif adalah diatas 90%. Untuk UED Rambah Muda, tingkat pengembalian responden cukup tinggi yakni mencapai 96,54% (bila memperhitungkan nilai pembayaran melebihi nilai angsuran pada setiap pembayaran, misal nilai angsuran Rp 122.000 per bulan dibayar Rp 244.000 per bulan dan pelunasan pinjaman lebih cepat dari periode waktu yang ditentukan). Bila kelebihan nilai angsuran pinjaman dan pelunasan pinjaman lebih cepat dari periode waktu yang ditentukan tidak diperhitungkan maka tingkat kelancaran pengembalian pinjaman 95,26%. Hal ini sekaligus menghapus keraguan bahwa masyarakat yang tergolong miskin akan susah mengembalikan pinjaman.

Tabel 18. Pembayaran Angsuran Pinjaman Responden

Uraian	Responden		Pengembalian Pinjaman		
	Orang	Presentase (%)	Seharusnya (Rp)	Dibayar (Rp)	Presentase %
Menunggak	5	25	17.360.000	14.0008.100	80,69
Tepat waktu	13	65	49.600.000	49.600.000	100,00
Lebih cepat	2	10	3.720.000	4.627.000	124,38
Total	20	100	70.680.000	68.232.100	96,54

Bila dianalisis berdasarkan tiga kategori kelancaran pengembalian kredit yaitu kurang lancar (menunggak), dan lancar (tepat waktu dan lebih cepat dari waktunya) terlihat bahwa jumlah pengembalian pinjaman yang tertunggak hanya sebesar 4,74 dari total angsuran keseluruhan yang seharusnya. Jumlah peminjam yang menunggak sebanyak 5 responden dari 20 total responden (25%).Tunggakan pengembalian pinjaman ini umumnya terjadi pada peminjam dengan usaha perkebunan, dimana ada pada saat tertentu panen berada pada masa trek (kurang), dan juga dijumpai pada 1 orang responden yang tertimpa musibah, sehingga tidak dapat menjalankan usaha dengan baik. Untuk hal khusus seperti ini pendamping berkoordinasi dengan peneglola lain berinisitaif menyisihkan sebagian laba umtuk menalangi angsuran

yang belum dibayar, mengingat peminjam benar-benar berada pada posisi yang sangat sulit.

Peminjam yang mengembalikan pinjaman dengan kategori lancar yaitu tepat waktu sebanyak 13 responden (65%). Sedangkan responden yang lebih cepat dari yang ditentukan sebanyak 2 responden (10%) dengan nilai Rp 4.627.000 (124, 38%).

#### 4.3.4. Peningkatan Pendapatan

Tabel 19. Pendapatan Bersih Pemanfaat dan Non Pemanfaat sebelum PPD

Batas Kelas Pendapatan Bersih Sebelum PPD (Rp)	Frekuensi (Responden)	Persentase (%)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
<b>Pemanfaat</b>				
0 -449.000	0		0	
450.000 - 799.000	7	35	4.290.000	24,06
800.000-1.149.000	11	55	11.000.500	61,69
1.150.000 -1.499.000	2	10	2.540.000	14,25
1.500.000 -1.849.000	0	0	0	
1.850.000 -2.199.000	0	0	0	
Lebih dari 2.200.000	0	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>17.830.500</b>	<b>100</b>
<b>Non Pemanfaat</b>				
0 -449.000				
450.000 - 799.000	3	100	1.850.000	100
800.000-1.149.000				
1.150.000 -1.499.000				
1.500.000 -1.849.000				
1.850.000 -2.199.000				
Lebih dari 2.200.000				
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100</b>

Pendapatan responden pemanfaat sebelum PPD terbanyak berada pada range Rp 800.000 - Rp 1.149.000 yaitu sebanyak 11 responden (55%) dengan total pendapatan Rp 11.000.500. Diikuti pada range Rp 450.000 - Rp 799.000 yaitu sebanyak 7 responden (35%) dengan total nilai pinjaman Rp 4.290.000. Pada range Rp 1.150.000 - Rp 1.499.000 ditemukan pada 2 responden (10%) dengan nilai total Rp 2.540.000 . Untuk Non pemanfaat pendapatan hanya berada pada range Rp 450.000 - Rp 799.000 dengan nilai total pendapatan Rp 1.850.000.

Setelah adanya PPD sebaran pendapatan pemanfaat cukup merata. Untuk range Rp 800.000- Rp 1.149.000 ditemukan pada 2 responden (10%) dengan total nilai pendapatan Rp 1.750.000. Frekuensi terbanyak adalah pada range Rp 1.150.000 - Rp 1.499.000 yaitu sebanyak 6 responden (30%) dengan total nilai pendapatan Rp 7.800.000 (23,96%). Diikuti pada range Rp 1.500.000 - Rp 1.849.000 yaitu sebanyak 5 responden (25%) dengan total nilai pendapatan Rp 7.950.000 (24,42%). Sisanya 3 responden (15%) memiliki pendapatan lebih dari Rp 2.200.000. Sedangkan untuk non pemanfaat range pendapatan masih sama semuanya namun pada range yang berbeda dari sebelumnya yaitu Rp 800.000- Rp 1.149.000 dengan nilai pendapatan Rp 2.800.000.

Tabel 20. Pendapatan Bersih Pemanfaat dan Non Pemanfaat Sesudah PPD

Batas Kelas Pendapatan Bersih Setelah PPD (Rp)	Frekuensi (Responden)	Persentase (%)	Nilai (Rp)	Persentase (%)
0 -449.000	0	0	0	
450.000 – 799.000	0	0	0	
800.000-1.149.000	2	10	1.750.000	5,38
1.150.000 -1.499.000	6	30	7.800.000	23,96
1.500.000 -1.849.000	5	25	7.950.000	24,42
1.850.000 -2.199.000	3	15	5.960.000	18,31
Lebih dari 2.200.000	4	20	9.100.000	27,96
Jumlah	20	100	32.550.000	100
<b>Non Pemanfaat</b>				
0 -449.000				
450.000 - 799.000				
800.000-1.149.000	3	100	2.800.000	100
1.150.000 -1.499.000				
1.500.000 -1.849.000				
1.850.000 -2.199.000				
Lebih dari 2.200.000				
Jumlah	3	100		100

Apabila dibandingkan tabel 19 dengan tabel 20 maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang mencolok. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga jual produksi dan yang paling utama adalah peningkatan jumlah

produksi usaha. Tidak hanya pada pemanfaat, peningkatan pendapatan juga terlihat ada non pemanfaat.

Tabel 21. Pendapatan bersih dan perkapita pemanfaat dan non pemanfaat.

Jumlah Pendapatan Bersih Sebelum PPD (Rp)	Jumlah Pendapatan Bersih Setelah PPD (Rp)	Jumlah Anggota keluarga responden (jiwa)	Pendapatan Perkapita sebelum PPD (Rp)	Pendapatan Perkapita setelah PPD (Rp)
<b>Pemanfaat</b>				
17.830.500	32.550.000	111	160.635	293.243
<b>Non Pemanfaat</b>				
1850.000	2800.000	12	154.167	233.333

Pendapatan perkapita pemanfaat dengan non pemanfaat sebelum PPD tidak berbeda jauh yaitu masing-masing Rp 160.635 dan Rp 154.167 namun setelah PPD perbedaannya jelas terlihat dimana pendapatan pemanfaat menjadi Rp 293.243 sedangkan Non pemanfaat hanya Rp 233.243.

Tabel 22. Hasil uji t sampel berpasangan pendapatan pemanfaat sebelum dengan sesudah PPD

Uraian	Nilai
Rataan selisih antara besar yang Pendapatan sebelum dan sesudah PPD ( $\bar{D}$ )	735.975
Simpangan baku (Sd)	231.000
Jumlah sampel (n)	20
t-hitung	9,06
t-tabel	1,725

Hasil pengujian secara statistik menggunakan uji beda dua mean sampel berpasangan terhadap peningkatan pendapatan bersih responden sebelum mendapat pinjaman dan setelah mendapat pinjaman modal usaha dari Dana Usaha Desa ditunjukkan pada Tabel 22. Secara statistik peningkatan pendapatan responden setelah mendapatkan pinjaman modal dibandingkan pendapatan bersih responden sebelum mendapatkan pinjaman berbeda nyata ( $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ ). Hal ini berarti peningkatan pendapatan bersih setelah mendapatkan pinjaman dengan kenaikan yang cukup besar signifikan berbeda dengan pendapatan bersih responden sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari Dana Usaha Desa. Hal ini sekali lagi

membuktikan bahwa pinjaman modal usaha secara signifikan meningkatkan produktifitas usaha responden yang sekaligus meningkatkan pendapatan bersih untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui usaha mereka sendiri.

#### **4.3.5. Penyempurnaan Strategi Penyaluran Dana Usaha Desa**

Penyempurnaan atau membentuk strategi baru Penyaluran Dana Usaha Desa didekati dengan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP adalah salah satu bentuk pengambilan keputusan yang pada dasarnya menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah dalam kelompok-kelompoknya.

Perbedaan mencolok antara AHP dengan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada jenis inputnya. Model-model yang sudah ada seperti analisa SWOT memakai input yang kuantitatif atau data sekunder. AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ekspert sebagai input utamanya.

Seiring dengan perkembangan usaha, UED-SP perlu melakukan perubahan-perubahan demi peningkatan ekonomi masyarakat. Secara umum penyaluran dana berjalan dengan baik, sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program. Namun masih ada beberapa kendala dan perancangan rencana kedepan yang masih perlu jadi perhatian.

Pada dasarnya harapan masyarakat sangat besar kepada keberlangsungan UED-SP dalam rangka peningkatan usaha ekonomi mereka. Selama ini masyarakat sangat kesulitan untuk menjangkau lembaga keuangan, terutama yang memihak kepada mereka.

Perlu disusun strategi penyempurnaan penyaluran dana usaha desa, dalam rangka meningkatkan peran UED SP sebagai salah satu pioneer perekonomian desa, menuju kemandirian desa.

Tabel 23. Rekapitulasi prioritas pelaku dan kendala

Hirarki Pelaku	Nilai	Hirarki Kendala	Nilai
Pemanfaat	0.395	Ketrampilan	1.00
Non Pemanfaat	0.334	Apatisme masyarakat	0.333
		Sosialisasi belum menyentuh seluruh masyarakat	0.333
		Saingan dari BRI	0.333
Pengelola	0.173	Rendahnya profesionalisme	0.292
		Kelengkapan dana operasional	0.177
		Minimnya dana pinjaman	0.296
		Pengetahuan pengelola	0.188
		Dominansi kepala desa	0.047
Pendamping	0.036	Belum ada payung hukum	1.00
Pemerintah	0.062	Kesejahteraan pendamping	1.00

#### 4.3.5.1. Pemanfaat

Pemanfaat adalah masyarakat yang menjadi anggota UED sekaligus memanfaatkan dana pinjaman untuk pengembangan usaha. Diskusi secara ad hoc yang dilakukan hanya menempatkan satu level kendala yaitu kurangnya kerampilan pemanfaat sehingga berujung pada lemahnya potensi untuk pengembangan usaha, termasuk kedalamnya pengetahuan tentang pasar.

#### 4.3.5.2. Masyarakat atau non pemanfaat

Apatisme masyarakat merupakan kendala yang ditemukan dilapangan. Hal memiliki nilai prioritas yang sama (L: 0,333) dengan adanya saingan dari BRI dan kurangnya sosialisasi. Untuk saingan dari BRI, hal ini dikemukakan oleh beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa sebagian dari mereka lebih memilih mengajukan usulan pinjaman kepada bank tersebut karena memiliki suku bunga yang sama dan pencairannya lebih cepat. Selain itu masyarakat juga merasakan kurangnya sosialisasi terutama tentang kemudahan pinjaman melalui UED-SP.

#### 4.3.5.3. Pengelola

Profesionalisme pengelola menjadi sorotan utama setelah kurangnya dana pinjaman (L:0,296). Hal ini dapat dilihat dengan kurang jelasnya pembagian tugas sehingga ada beberapa bagian yang tumpang tindih dan saling lempar tanggung

jawab. Pengetahuan pengelola (L:0,188) juga harus ditingkatkan untuk menyongsong pengembangan usaha selanjutnya dan juga dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada pemanfaat dan masyarakat. Kelengkapan operasional tidak kalah menjadi perhatian dibanding yang lain (L:0,188) dan menempatkan kendala ini pada prioritas ke tiga.

Peran kepala desa sangat berpengaruh dalam penyaluran dana program ini, sehingga merupakan salah satu indikator minus dalam proses pemberdayaan, namun demikian kendala ini diletakkan pada prioritas terakhir (L: 0,045).

#### 4.3.5.4. Pendamping desa

Khusus pendamping desa Rambah Muda merupakan pendamping terbaik tingkat Provinsi Riau, ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas pendamping. Disisi lain, kesejahteraan pendamping perlu diperhatikan mengingat sulitnya wilayah kerja dan besarnya jasa yang diberikan.

#### 4.3.5.5. Pemerintah

Dalam proses pemberdayaan peran pemerintah dicoba untuk dikurangi sehingga dapat menumbuhkan tri guna pembangunan yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Dibelakang itu justru ada bagian tertentu yang harus difasilitasi pemerintah terutama dalam perancangan payung hukum UED-SP.

Tabel 24. Rekapitulasi nilai prioritas strategi penyempurnaan

Strategi	Nilai	Rangking
Pelaksanaan Pelatihan training berkala	0,185	2
Menggerakkan Struktur Organisasi	0,139	3
Berdayakan Aparat desa dan tokoh masyarakat	0,187	1
Usulan dana yang tidak mengikat	0,122	5
Kerjasama dengan PT.PER	0,149	4
Buat Perda UED-SP & Bum-Des	0,080	7
Berdayakan PD sebagai agen sinergitas program di desa	0,045	8
Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah	0,093	6
Jumlah	1	

Analisa dengan bantuan expert choice menempatkan strategi berdayakan aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi prioritas paling utama (L: 0,187). Masyarakat menilai peran tokoh masyarakat belum maksimal, terutama dalam koordinasi. Optimalisasi ketua RT dan RW perlu ditingkatkan lagi, sehingga kedepan

diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang apatis dan merasa takut memanfaatkan dana pinjaman.

Prioritas selanjutnya adalah Pelaksanaan pelatihan training berkala (L:185). Masyarakat Rambah Muda tergolong rajin dan ulet, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik, sehingga jalannya roda usaha tidak berjalan secara optimal. Pelatihan telah pernah dilakukan didesa ini. Masyarakat menyambut dengan baik, hasilnya belum terasa cukup. Jenis pelatihan yang diharapkan antara lain Kewirausahaan, teknologi tepat guna maupun usaha tani.

Dalam rangka menanggulangi kekurangan pinjaman, saat ini telah dilakukan persiapan kerjasama dengan PT.PER (permodalan Ekonomi Rakyat). Strategi ini ditempatkan pada prioritas ke-3 (L:0,139). Selanjutnya usulan dana yang tidak mengikat menjadi prioritas dibawahnya (L:122). Sumber dana yang akan diusahakan adalah bantuan dari pemerintah daerah. Hal yang cukup menarik adalah UED-SP akan menjadikan lomba UED-SP terbaik tingkat provinsi sebagai sumber dana bagi pengelolaan. Karena dari pengalaman sebelumnya hadiah untuk pemenang lomba ini cukup tinggi.

Membuat Perda UED-SP & Bum-Des menjadi prioritas selanjutnya (L:0,080). Hal ini sangat dibutuhkan untuk kelancaran UED-SP kedepan. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pengelola, baik dengan koordinasi dengan fasilitator PPD maupun lainnya, apalagi nanti setelah adanya penambahan modal melalui kerjasama dengan PT.PER.

Pendamping desa Rambah Muda terpilih sebagai pendamping terbaik tingkat Provinsi Riau, dan tentunya telah memenuhi perannya sebagai seorang fasilitator di tingkat desa dengan baik. Namun untuk kedepan, dengan semakin berkembangnya UED-SP diharapkan pendamping dapat menjadi sebagai agen sinergitas program di desa. Misalnya sebagai fasilitator penghubung masyarakat dengan birokrasi.

Salah satu tujuan PPD adalah munculnya kemandirian masyarakat. Sehingga tidak salah bahwa koordinasi dan sinergi dengan pemerintah ditempatkan pada proritas terakhir (L:0,093).